

**FEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PT VALE di DESA BARUGA KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

IKRAM ALAMSYAH

NIM 14.16.4.0048

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO
2018**

**FEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PT VALE di DESA BARUGA KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh :

IKRAM ALAMSYAH

NIM 14.16.4.0048

Di Bimbingan Oleh:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H**
- 2. Ilham. S,Ag., M.A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALOPO
2018**

P R A K A T A



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur ke hadirat Allah swt, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari aspek metodologis maupun pembahasan substansi permasalahannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan do'a, bantuan, bimbingan, masukan serta dorongan moril dari berbagai pihak yang kesemuanya ini sangat membantu penulis dalam rangka menyusun skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih terkhusus yang teristimewa, kedua orang tuaku Ibunda Helmi Miskan dan Ayahanda Ahmad Alam yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang.

Dalam proses penyusunan penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abdul Pirol, M.Ag, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Dr. Hj.

Ramlah Makkulasse, M.M., dan Wakil Dekan I Dr. Takdir, S.H., M.H., Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati. M.,Ag., Wakil Dekan III dan Bidang Kemahasiswaan Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. Bapak Ilham, S.Ag., M.A. Sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, Ibu Misnawati, ST., MM, Kasubag Akademik yang telah membantu, memotivasi, membimbing, dan memberi dukungan selama menyusun. Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M.H. sebagai pembimbing I dan Bapak Ilham, S.Ag., M.A. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi ini. Kepala perpustakaan Dr. Masmuddin, M.Ag. beserta stafnya, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan buku-buku/literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Saudaraku Ikrar, Irham, Dian Lestari Dan Dina yang telah memberi dukungan dan kasih sayang kepada penulis sampai sekarang.

Akhirnya, kepada pihak yang terkait dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu, penulis berdoa semoga Allah SWT dapat memberikan pahala yang berlipat ganda dan mudahkan skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Amin.

Palopo, 05 Februari 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Tinjauan Pustaka	12
1. Pengertian Efektifitas	12
2. Program Pemberdayaan (community development).....	16
3. Pengertian Pemberdayaan	25
C. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Sumber Data	33
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Deskripsi Objek Penelitian	37
B. Persepsi Semua Pihak yang Terlibat dalam Penyaluran Dana Comdev.....	40
C. Hasil Penelitian.....	42

BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Ikram Alamsyah, 2018. “ Efektifitas Program Pemberdayaan Masyarakat PT VALE di Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur”.

Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing (I). Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M.H. dan Pembimbing (II) Ilham., S. Ag., M.A.

Kata kunci: Efektifitas, Program, Pemberdayaan

Skripsi ini membahas tentang efektivitas program pemberdayaan masyarakat PT VALE di Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Program pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari CSR perusahaan PT VALE dimana fokus daripada program pemberdayaan masyarakat tersebut terbagi menjadi beberapa bidang diantaranya yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

Penelitian ini adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ini adalah masyarakat Desa Baruga Direktur Eksekutif PT Vale, Pengurus Kabupaten, Pengurus Kecamatan, Pengelola dana di Desa Baruga, Pengawas lapangan Desa Baruga, Pemerintah Desa. Pemilihan Subjek penelitian yakni pengambilan informan yang didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik analisis yang digunakan ialah reduksi data, penyajian data, verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa Baruga efektif dengan melihat semua program yang telah terlaksana diantaranya ada lima program pemberdayaan yang menjadi tujuan utamanya yaitu, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan selain itu dari beberapa informasi yang didapatkan juga menjadi bukti keberhasilan, adapun hasil akhir dari penelitian ini ialah bagaimana masyarakat yang berada di Desa Baruga lebih sejahtera dan program pemberdayaan yang ada di Desa Baruga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang agar masyarakat merasakan pemerataan kesejahteraan secara menyeluruh. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok Pembangunan seperti ketimpangan Pembangunan antara desa dan Kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga Pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Pembangunan Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan Pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam Pembangunan Desa Pemerintahan Desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga Desa memiliki kewenangan tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan

kewajiban desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun Pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan Desa.¹

Beberapa hal yang menyebabkan Desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 2) Kesenjajheraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

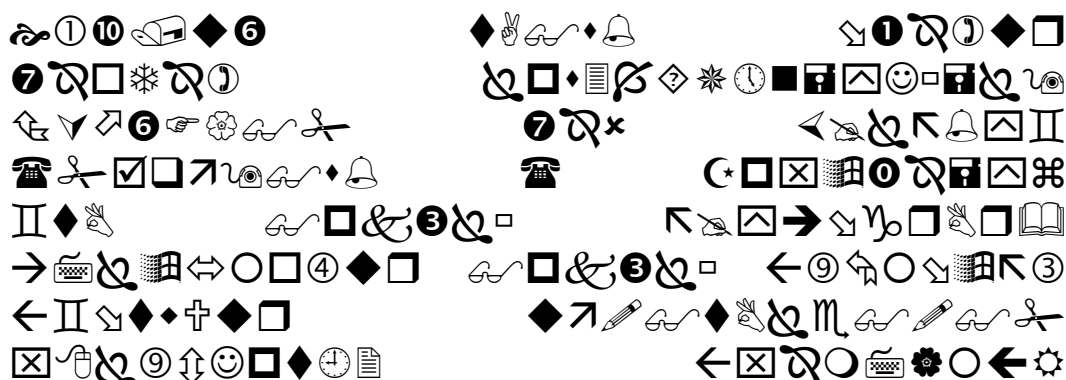
Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi Desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan Pemberdayaan masyarakat.²

¹ Putra Kusuma Chandra, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa,*” *Jurnal Admistrasi Publik*, vol 1No 6, h..2.

² Putra Kusuma Chandra, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa,*” *Jurnal Admistrasi Publik*, vol 1, No 6, h..1.

Berdasarkan Undang Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Alokasi Pendapatan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Alokasi Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi dan APBD Kabupaten Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendanai seluruh penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.³ dalam ajaran islam telah dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sudah diatur karena hal tersebut berhubungan dengan kemaslahatan umat dan bagaimana konsep pengembangan masyarakat yang baik telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surah al-Baqarah/2 : 30 yang berbunyi:



³ Tim Visi Yustisia, "Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa" (Cet.1, Jakarta selatan, 2016) h.29

mendapatkan CSR dari PT VALE yang nantinya disalurkan kepada masyarakat untuk Pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Pemerintah Desa yang menjadi penyalur dana tersebut diberikan wewenang untuk menyalurkan dana guna untuk mensejahterakan masyarakat dengan adanya dana tersebut, selain itu pemerintah desa harus mensosialisasikan dana tersebut kepada masyarakat agar supaya masyarakat mengetahui bahwa sebuah perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial yang harus diberikan kepada masyarakat itu sendiri.

Khusus Kecamatan Malili Desa Baruga PT VALE melakukan program pemberdayaan kepada masyarakat namun melalui aparat Pemerintah Desa, guna dana tersebut nantinya tersalurkan kepada masyarakat sesuai dengan jumlah CSR yang diberikan oleh perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Baruga, namun di Desa Baruga sendiri masyarakat menyebut bahwa program pemberdayaan yang dilakukan oleh PT VALE tersebut harus tersalurkan sesuai aturan aturan yang jelas sehingga nantinya masyarakat merasakan adanya perhatian yang sama dari perusahaan PT VALE dan Pemerintah Desa harus mampu menjadi wadah bagi masyarakat bagaimana program pemberdayaan tersebut mampu mensejahterakan masyarakat sebagaimana tujuan diberikannya program pemberdayaan tersebut yaitu untuk pemberdayaan masyarakat. dimana pemberdayaan tersebut diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat Desa Baruga. untuk itu Pemerintah Desa Baruga harus betul-betul jeli dalam melihat apa apa saja yang harus menjadi prioritas untuk program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Baruga. untuk itu, Pemerintah Desa Baruga harus menetapkan seperangkat aturan yang jelas untuk menetapkan siapa saja penerima program

pemberdayaan tersebut. ataupun menentukan siapa saja yang berhak menerima program tersebut.

Namun dengan adanya program pemberdayaan tersebut ternyata tidak juga membuat masyarakat sebagian merasa diperhatikan oleh pemerintah Desa Baruga, karena sebagian masyarakat menganggap penyaluran program pemberdayaan tersebut tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang berhak menerima program pemberdayaan itu sendiri.

Penduduk yang bertempat tinggal di Desa Baruga itu berjumlah 3.309 penduduk dan 1.330 KK.

Pandangan masyarakat Desa Baruga mengingkan adanya transparansi terkait tentang program pemberdayaan. Namun melihat kondisi yang ada setelah melakukan observasi selama beberapa hari di Desa Baruga penulis melihat bahwa ada sebuah permasalahan dalam program pemberdayaan Dimana program pemberdayaan yang ada di Desa Baruga tidak terlihat adanya peningkatan yang signifikan baik dari segi ekonmi maupun maupun program pemberdayaan yang lainnya selain itu tidak pula ditetapkan berapa jumlah nominal yang berhak diterima oleh masyarakat dan kemudian masyarakat hanya mendapatkan dana tersebut sesuai dengan usaha yang dijalankannya, dan dalam pemberdayaan masyarakatnya tidak terlihat karena masyarakat hanya diberikan dana kemudian setelah itu masyarakat tidak lagi mendapatkan perhatian dari pemerintah desa. Untuk itu Pemerintah Desa seharusnya memiliki aturan aturan yang jelas terkait tentang penyaluran dana program pemberdayaan kepada masyarakat agar nantinya

masyarakat betul betul paham tentang program program yang menjadi pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan paparan penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat PT VALE di Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan adalah apakah program pemberdayaan yang berada di Desa Baruga efektif dalam memberdayakan masyarakat.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami program pemberdayaan di Desa Baruga betul efektif dalam memberdayakan masyarakat Desa Baruga.

D. Manfaat Penelitian

Permasalahan di atas merujuk pada sebuah manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta informasi khususnya kajian ekonomi.

2. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan serta dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah kepustakaan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini berjudul "Efektivitas program pemberdayaan masyarakat PT VALE di Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Untuk pemahaman/ pengkajian terhadap judul di atas, penulis mengemukakan beberapa definisi yang dianggap penting sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, dimana apabila semakin besar presentase target yang dicapai, maka semakin tinggi pula efektivitasnya. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

2. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan terhadap individu maupun kelompok sosial masyarakat untuk memberikan kebebasan dalam menentukan pilihan pilihan dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya demi tercapainya tujuan yang diharapkan.



IAIN PALOPO

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu agar nantinya dapat menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Skripsi terdahulu yang dijadikan acuan semuanya membahas tentang Community Development (Comdev), namun yang berbeda dari segi lokasi penelitian, dan pokok permasalahan.

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syaniatul Wida (2017), dengan judul skripsi "*Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*".¹ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi program CSR yang telah dibentuk PT Telkom Indonesia, Tbk Bandar Lampung Terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitiannya menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian. Jenis penelitian dengan mencari hubungan antara implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. Telkom, Majapahit Bandar Lampung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Titik perbedaan antara kedua penulis yaitu terlihat pada tujuan daripada penelitian, dimana penulis yang pertama ingin

¹ Syaniatul Wida, *Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perpektif Ekonomi Islam*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h 60.

mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian yang ingin mengetahui ke efektifan dari penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Baruga.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Guntur Poerboyo (2010) dengan judul skripsi *Implementasi Program Pengembangan Masyarakat (Community Development) Melalui Pola Kemitraan pada Sektor Privat*.² Program *Community Development* yang dilakukan sector privat dalam mendukung *sustainable development*. Realisasi program *community development* umumnya bersifat filantropi dan pendekatan yang dilakukan belum memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya, membangun kesadaran kritis dan memandirikan mereka, Tujuan penelitian untuk menggali dan mendeskripsikan implementasi program pengembangan masyarakat (*community development*) melalui pola kemitraan pada sektor privat di PTPN VII. Metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif atas dasar spesifikasi obyek penelitian dan untuk mendapat informasi yang mendalam tentang sebuah fenomena sosial. Penelitian ini membutuhkan data Sekunder dan data Primer. data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan, mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian dan dokumentasi. Sedangkan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan menggunakan *interview guide* (pedoman wawancara).Titik perbedaan antara kedua penulis yaitu terlihat pada tujuan daripada penelitian itu sendiri, dimana

² Muhammad Guntur Poerboyo, *Implementasi Program Pengembangan Masyarakat (Community Development) Melalui Pola Kemitraan pada Sektor Privat* Lampung: Universitas Lampung, 2010) h. 34

penulis yang pertama ingin mengetahui implementasi pengembangan masyarakat (community development) atau penerapan langsung ke masyarakat sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian yang ingin mengetahui ke efektifan dari penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Baruga.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putranti Budi Maygarindra Rovila EI Maghviroh (2012) yang berjudul "*Analisis Alokasi Corporate Social Responsibility serta Pelaporan Sustainability Report Berdasarkan Global Reporting Intiative (GRI G3) di PT. Pembangunan Jawa Bali*".³ Kegiatan CSR juga harus tepat sasaran karena jumlah anggaran dana yang dibutuhkan terbilang cukup tinggi untuk pelaksanaan kegiatan. Perusahaan perlu untuk melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah mana saja yang akan menjadi sasaran kegiatan CSR agar penyaluran dana CSR menjadi tepat sasaran. Mengingat sustainability report itu begitu penting untuk perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui alokasi dana mulai dari penentuan, pengajuan, proses serta pencairan dana untuk kegiatan CSR di PT. pembangunan Jawa Bali (PBJ).

³ Putranti Budi Maygarindra Rovila EI Maghviroh, *Analisis Alokasi Corporate Social Responsibility serta Pelaporan Sustainability Report Berdasarkan Global Reporting Intiative (GRI G3) di PT. Pembangunan Jawa Bali*, 2012. Jurnal | Volume 2 No. 2 h. 33

B. Kajian Pustaka

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai efek, pengaruh atau akibat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) efektif berarti dapat membawa hasil, berhasil guna, manjur atau mujarab, ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya).⁴

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Handayani, Soewarno. (1988:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan Georgopolous dan Tannebaum (1985:50), mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran

⁴ Andi Azhar Mustafa, Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar, Skripsi (Makassar: Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2015) h.13. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/12345678916963/SKRIPSI%20ANDI%20AZHAR%20MUSTAFA%20%20E211%2010%20258.pdf?sequence=1> (di akses tanggal 6 April 2018)

maupun tujuan”. Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).

Efektivitas menunjukkan tercapainya suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.⁵

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan

⁵ Ratna Vita Angela, *Efektifitas Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility Sebagai Bentuk Akuntabilitas Publik*, 2014. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 3. No 6 h. 4. <https://ejournal.stiesia.ac.id> (di akses pada tanggal 5 Februari 2018)

waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008:77), yaitu:⁶

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya pengelola dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para pengelola dan pelaksana tidak tersesat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatangi tujuan-tujuan dengan usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan pengelola di masa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

⁶ Andi Azhar Mustafa, Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar, Skripsi (Makassar: Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2015) h.15. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/12345678916963/SKRIPSI%20ANDI%20AZHAR%20MUSTAFA%20%20E211%2010%20258.pdf?sequence=> (di akses tanggal 6 April 2018)

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Selama berabad abad, ahli ekonomi, filsuf, insinyur, jenderal militer, pemimpin pemerintahan, dan bahkan menejer telah berusaha mendefinisikan, mengukur, menganalisis, dan menangkap inti dari efektifitas. Adam Smith menulis dalam *wealth of nations*, dua abad yang lalu, bahwa efisien dari pekerjaan dapat dicapai paling mudah melalui tingkat spesialisasi yang tinggi. Apakah seorang pemimpin dapat mempengaruhi efektivitas dan bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi efektivitas sulit untuk ditentukan. Masih terdapat kebingungan mengenai bagaimana mengelola sebuah organisasi sehingga efektif.

Namun ada beberapa kriteria efektivitas dalam sebuah perusahaan yaitu diantaranya kriteria berdasarkan waktu, dari kriteria efektivitas berdasarkan waktu muncullah istilah kriteria jangka panjang, pendek, serta menengah, Kriteria jangka pendek adalah kriteria yang merujuk pada hasil tindakan yang dilakukan dalam waktu satu tahun atau kurang. Kriteria jangka menengah dapat diterapkan ketika

anda mempertimbangkan efektifitas dari suatu kelompok atau individu dan organisasi untuk periode waktu yang lebih lama, mungkin lima tahun. Jangka panjang adalah Kriteria di mana masa depan yang tidak pasti digunakan atau diterapkan.

2. Program Pemberdayaan (*community development*)

CSR merupakan tanggung jawab sebuah perusahaan terhadap dampak yang di timbulkannya, ada sebuah pengertian CSR yang dikeluarkan oleh lingkaran studi CSR Indonesia, yakni “upaya sungguh sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, social, dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.” Secara *Implicit*, defefinisi tersebut berarti mengajak perusahaan bersungguh sungguh dalam upaya memberikan manfaat atas kehadirannya bagi umat manusia saat ini. Meminimalkan dampak negatif adalah bagian dari usaha memberikan manfaat dimasa yang akan datang.⁷

Saat ini, pemahaman atas tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) banyak yang mengartikan hanya sebatas *charity philanthropy, dan community development*. Bahkan, tak jarang tanggung jawab CSR tersebut hanya di bebankan pada bagian atau defisi tertentu. Pada hal kenyataannya, kegiatan-kegiatan CSR merupakan suatu keputusan strategis yang

⁷M. Ranchman, Nurdizal *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, h. 15

melibatkan semua sumber daya perusahaan atau suatu keputusan strategis yang menyeluruh.

Kegiatan kegiatan CSR dalam bentuk Comdev, *Charity*, ataupun *Philanthropy* yang saat ini berkembang di Indonesia masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang tidak jauh dari lokasi tempat usaha dijalankannya. Walaupun sadar akan pentingnya CSR, perusahaan mengimplementasikan CSR dengan menggunakan metode yang berbeda beda. Implementasi yang dilakukan dapat menggunakan model Charity atau pemberdayaan. Perusahaan yang menggunakan model Charity hanya berpatok sekedar menghabiskan anggaran dan menafikkan kebutuhan masyarakat. Model Charity mendapat kritikan karena model tersebut hanya menjadi candu bagi masyarakat dan membuat masyarakat tergantung serta tidak berdaya.

Ketika model Charity mulai ditinggalkan maka model Comdev pun hadir sebagai pilihan. Model Comdev dianggap mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.⁸ Namun tidak dapat dimunafikkan bahwa walaupun model Comdev itu diterapkan tetap saja ada keluhan dari masyarakat terkait dengan penyaluran dana CSR tersebut, dimana pemerintah desa yang menjadi penyalur dana tersebut harus bertanggung jawab atas penyaluran dana tersebut.

⁸Nurdizal m. ranchman, et.al., *panduan lengkap perencanaan CSR*, (Cet. 1, Jakarta: 2011), h.1

Menurut *World Business Council for Sustainable Development*, CSR bukan sekedar *discretionary*, tetapi suatu komitmen yang merupakan kebutuhan bagi perusahaan yang baik sebagai perbaikan kualitas hidup. Secara filosofis, jika perusahaan berusaha untuk berguna bagi umat manusia maka dalam jangka panjangnya akan tetap eksis.

Community Development (Comdev) merupakan suatu proses usaha masyarakat sendiri diintegrasikan dengan otonomi pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal.⁹

Comdev dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial ekonomi budaya yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya.

Comdev adalah pola dukungan perusahaan melalui program fasilitas masyarakat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan daya saing dan mutu pendidikan, derajat kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak operasi PT. Vale.

Tujuan utama Comdev adalah bukan sekedar memberi barang atau bantuan tertentu kepada penerima, melainkan berusaha agar penerima memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Dengan kata lain, semangat utama

⁹ Sukaenah, *Tahapan Community Development Oleh Divisi Corporate Affairs PT. Djarum*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014) h.13

Comdev adalah pemberdayaan masyarakat. Terdapat 3 fokus perhatian Comdev adalah: 1) identifikasi masalah; 2) populasi; 3) arena.¹⁰

Landasan hukum pelaksanaan Comdev mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 1 yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) dan lingkungannya. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Perseroan Terbatas yaitu UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana dijelaskan di dalamnya tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan Pasal 74 ayat 1 yang berbunyi:¹¹

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰ Anis Mubasyiroh, *Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT Semen Indonesia Persero Tbk*, Skripsi (Air Langa: Universitas, 2016) h. 7

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun prinsip-prinsip utama yang mendasari pelaksanaan Comdev sebagai berikut:¹²

- a. Keberpihakan kepada rumah tangga miskin dan kelompok rentan

Comdev mengutamakan keberpihakan kepada rumah tangga miskin dan kelompok rentan sebagai penerima manfaat yang diterapkan pada tahapan kegiatan. Implementasi Comdev, baik dalam proses maupun pemanfaatan harus ditujukan bagi rumah tangga miskin, kelompok rentan atau anggota masyarakat yang tidak mendapatkan akses dan pelayanan pendidikan kesehatan serta ekonomi secara memadai. Masyarakat miskin harus didorong untuk ikut berperan aktif dalam pengambilan keputusan disetiap tahapan kegiatan baik di desa, antar/ lintas desa dan kecamatan, termasuk menerima manfaat dan memelihara keberlanjutannya.

- b. Keberpihakan kepada perempuan

Comdev mengutamakan keberpihakan perempuan terutama dari kalangan rumah tangga miskin dan kelompok rentan dengan memberikan akses atau kesempatan yang luas terhadap layanan pendidikan anak usia dini, kesehatan ibu dan anak serta kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Perempuan sesuai perannya berpartisipasi pada setiap tahapan program yang akan dilaksanakan.

¹² Tim Koordinasi Kabupaten, *Program Mitra Desa Mandiri*, (Ed Revisi, Luwu Timur: PT Vale Indonesia Tbk, 2014). h. 6-8

c. Bertumpu pada pembangunan sumber daya manusia

Comdev bertumpu pada prinsip pembangunan sumber daya manusia bahwa masyarakat memilih kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi lebih diarahkan pada upaya mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan bukan berorientasi pada pembangunan fisik semata.

d. Partisipasi

Comdev merupakan salah satu mekanisme perencanaan pelaksanaan dan pengendalian program pemberdayaan yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat. Program ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi termasuk kelompok yang selama ini belum mendapatkan pelayanan pendidikan, ekonomi dan kesehatan dalam setiap tahapan kegiatan dengan memberikan sumbangan pikiran, tenaga, dana maupun barang yang dimilikinya untuk membangun masa depan yang lebih baik.

e. Akuntabilitas

IAIN PALOPO

Dalam setiap tahapan kegiatan Comdev yang dilaksanakan harus dikelola secara benar sesuai dengan kaidah dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat atau kepada pihak lain yang berkepentingan baik secara moral, teknis, administratif serta sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yang telah disepakati secara bersama.

f. Transparansi

Prinsip transparansi atau keterbukaan dalam Comdev bahwa masyarakat memiliki akses terhadap seluruh informasi dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan kegiatan.

g. Kemandirian

Melalui Comdev, masyarakat diberikan ruang yang luas untuk menentukan pilihan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sesuai dengan permasalahan, kapasitasnya dan kebutuhan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan. Prinsip kemandirian juga mengandung pengertian bahwa masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri, bertanggung jawab dan berkontribusi secara positif terhadap keberhasilan pembangunan.

h. Kemitraan

Masyarakat bersama Pemerintah daerah dan perusahaan memiliki tanggung jawab bersama dalam meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi khususnya bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan. Masing masing pihak saling bekerjasama secara sinergis dalam mendorong pencapaian tujuan bersama dengan peran dan tanggung jawab masing masing sesuai kewenangannya. Masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk memutuskan dan mengelola kegiatan yang didanai perusahaan secara mandiri dan partisipatif melalui mekanisme yang ada sesuai dengan kesepakatan serta ketentuan yang berlaku.

i. Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan mengandung pengertian bahwa dalam setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pemeliharaan kegiatan telah mempertimbangkan sistem keberlanjutan dan pelestarian lingkungannya.

Sedangkan untuk tahapan pengembangan masyarakat (*Community Development*) sangat ditentukan oleh persiapan dan strategis perencanaan yang baik, sehingga program aksi pengembangan masyarakat dapat dicapai sasaran.

Dana Comdev bersifat stimulan dalam rangka mendukung upaya pemerintah daerah bersama masyarakat untuk meningkatkan akses dan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi perdesaan. Artinya bahwa kegiatan yang akan dilakukan masyarakat ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, membangun kemandirian dan pencapaian indikator keberhasilan program bukan semata-mata karena tersedianya dana *Community Development*. Kegiatan yang akan dilaksanakan perlu mendapat dukungan dan kontribusi masyarakat, pemerintah daerah atau sumber dana lainnya. Keswadayaan merupakan kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berkontribusi positif baik dalam bentuk pengetahuan, sumber daya, tenaga, material yang disumbangkan sebagai bagian dari kepedulian terhadap peningkatan akses pendidikan, kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Nilai keswadayaan masyarakat berupa kepedulian dan kerelaan masyarakat harus dipastikan atas kesadaran diri besa dari tekanan atau keterpaksaan. Comdev mendorong rumah tangga miskin dan kelompok rentan untuk terlibat dalam setiap pekerjaan dan tidak membolehkan pemotongan atas upah tenaga kerja yang menjadi haknya. Atau upah tersebut tidak boleh dipotong atau diminta sebagai bentuk dari kontribusi atau keswadayaan masyarakat.

Comdev berupaya mendorong peran serta pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak operasi PT. Vale. Salah satu upaya yang dilakukan melalui penguatan pemerintah lokal. Kegiatan ini dilakukan melalui proses pendampingan dan bimbingan teknis kepada pemerintah di Desa, kecamatan dan kabupaten dalam melaksanakan *Community Development*.

Community Development memberikan dukungan terhadap pemberdayaan masyarakat dengan sumber daya dan sumber pendanaan yang terbatas, sehingga sulit untuk mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, maka perlu dibuat prioritas kegiatan. Prioritas kegiatan diperlu agar yang diusulkan oleh masyarakat benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Dalam pelaksanaannya *Community Development* bukan bersifat bantuan langsung tunai (*cash program*) atau dibagi rata kepada masyarakat, melainkan sebagai dana stimulan yang diharapkan dapat mendorong kemandirian, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi terutama bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan.

3. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan yang dalam Bahasa Inggrisnya "*Empowerment*" terjemahan secara harfiahnya, yaitu "pemberkuasaan" atau juga "pemberdayaan" diartikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan (power) keberdayaan kepada masyarakat yang lemah. Robert Chambers sebagaimana diikuti oleh Kartasmita "pemberdayaan" (*empowerment*) sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu bersifat "*people centerecipatory, empowering and sustainable.*" Selama ini paradigma yang dominan dalam pembangunan adalah suatu paradigma yang meletakkan peranan Negara/ Pemerintah pada posisi yang sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.¹³

Sejalan dengan pemikiran itu, Stewart mengatakan bahwa pemberdayaan adalah member kekuasaan, mengalihkan kekutan atau mendelgasikan otoritas atau kewenanga kepada pihak lain atau member kemampuan dan keberdayaan. Proses pemberdayaan pencapaian tujuan, dengan pendelegasian otoritas, penciptakan sistem atau prosedur akan mempercepat pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pemberdayaan tersebut memerlukan pengungkapan pandangan pimpinan dengan jelas dan jujur yang bermaksud mendorong aparat dalam memberikan pelayanan

¹³Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h 45

yang bermutu. Pemberdayaan menjadi sebuah proses menuju peningkatan kekuatan, kemampuan, dan daya. Lebih lanjut Stewart menyatakan:¹⁴

- a. Pemberdayaan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- b. Pemberdayaan juga memberikan kepada staf rasa berprestasi yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan motivasi.
- c. Pemberdayaan juga memberikan manfaat–manfaat besar bagi organisasi dimana salah satunya adalah bertambahnya efektifitas organisasi.

Mubyarto menekankan dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia di pedesaan, penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari

¹⁴Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, h. 46

apa yang di dalam bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

Prijono dan Pranarka menyebutkan pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi), dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok. Dari sini dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan upaya berkesinambungan yang terus menerus tidak terputus yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mengembangkan daya (potensi) dan sumber daya (pusat kekuatan). Tersirat adanya transformasi dari tidak mempunyai daya menjadi berdaya, dan dari berdaya lemah bertambah menjadi berdaya kuat atau terus menjadi adidaya.¹⁵

Memperhatikan dinamika perkembangan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah rakyat/masyarakat menampakkan adanya keterbukaan dan perbaikan posisi tawar yang lebih dinamis perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Segenap usaha untuk menjadikan manusia berkemampuan, berdaya, dapat disebut pemberdayaan atau dengan kata lain pemberdayaan adalah segenap proses untuk memanusiawikan manusia dengan segenap harkat dan martabat yang melekat pada dasarnya dapat disebut pemberdayaan selanjutnya upaya memandirikan masyarakat desa.

¹⁵Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, h. 47

Mandiri di sini adalah percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan ketangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, dengantumpuan pada identitas, intergritas dan kepribadian. Hagul (1992:11) menyatakan konsep kemandirian, dapat dilihat dari sisi, yakni adanya penekanan pada kemampuan menyeluruh dari penduduk pedesaan pada kemampuan mempengaruhi lingkungan mereka, dan hal ini hanya dapat mencapai kalau pembangunan pedesaan merupakan proses pembangunan kemandirian mereka.

Kaitan dengan masyarakat mandiri adalah masyarakat yang berdiri kokoh atas dasar potensi atau kekuatan dan kemampuan sendiri serta selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Masyarakat mandiri mampu memproduksi, mendistribusi dan memenuhi kebutuhan utama mereka sendiri, tanpa terlalu tergantung pada pihak lain. Menurut Ndraha (1986:3,34) bahwa masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri atau masyarakat mandiri dapat berfungsi sebagai subyek pembangunan. Secara konseptual masyarakat mandiri ialah masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mengatur dan menata kehidupannya sendiri. Selain itu ia mampu mengendalikan atau mempengaruhi masa depannya sendiri. Lebih lanjut Ndraha (1986:34) menegaskan, konsep masyarakat mandiri dapat dioperasionalkan menjadi beberapa indikator, yaitu:¹⁶

- a. Kemampuan masyarakat untuk mengusahakan, memelihara atau merawat segenap sumber, asset, dan sarana yang ada, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.

¹⁶Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, h. 49

- b. Kemampuan masyarakat untuk bangkit kembali dari keadaan jatuh atau mundur sebagai akibat kekeliruan yang pernah ditempuhnya.
- c. Kemampuan masyarakat untuk mengembangkan atau meningkatkan sumber, asset, atau peratan yang ada
- d. Kemampuan masyarakat untuk memberikan respons positif terhadap setiap perubahan social yang berlangsung.

Partisipasi masyarakat akan jalan apabila pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal bagi mereka. Dari sini pula kita dapat mengemukakan bahwa pelayanan masyarakat adalah fungsi Pemerintah yang sangat penting selain pembangunan Desa. dan sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk mensejahterahkan warganya serta bagaimana peran Pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya.

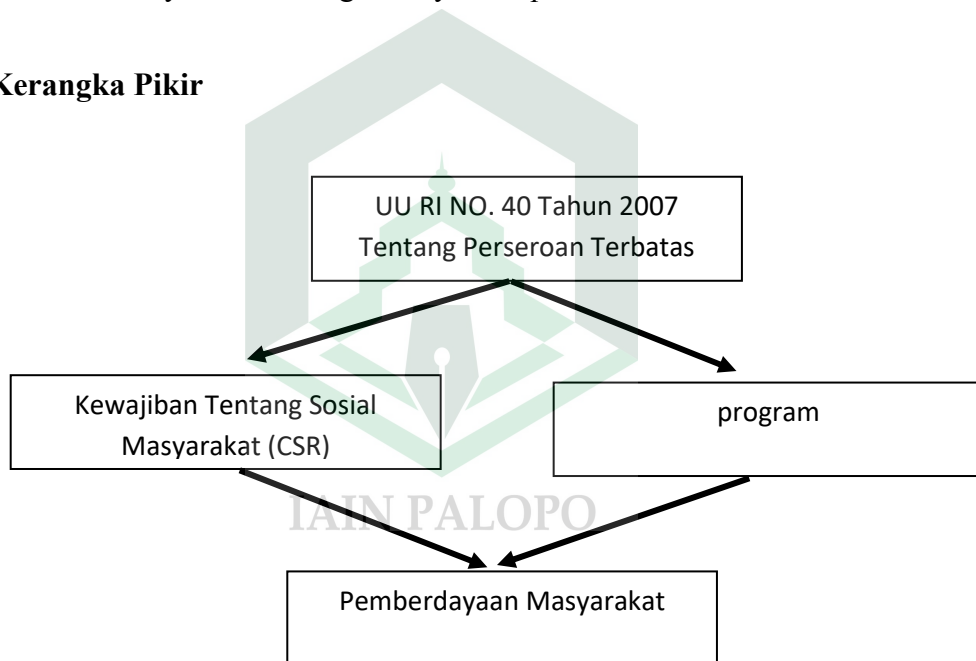
Adapun menurut Iff¹⁷ menyebutkan indikator masyarakat yang telah di berdayakan antaran lain:¹⁷

- a. mempunyai kemampuan menjangkau dan menggunakan pranata dan sumber sumber yang ada di masyarakat.
- b. Dapat berjalannya bottom up planning
- c. Kemampuan dan aktifitas ekonomi
- d. Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga
- e. Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.

¹⁷Asam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, h. 62

Adapun dalam buku Soetomo dikatakan bahwa unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak bisa dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tersebut, kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut sering juga disebut masyarakat kurang berdaya atau *powerless*.¹⁸

C. Kerangka Pikir



¹⁸Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Cet, 3 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 8

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka, dapat diketahui bahwa dana Comdev atau CSR sebuah perusahaan memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya yaitu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Namun upaya menyalurkan dana Comdev tersebut harus melalui struktur dan mekanisme yang menjamin adanya kontrol sehingga penyaluran dana nantinya bersifat transparansi terhadap masyarakat dan masyarakat tidak lagi keliru dalam menilai.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu pengelolaan data yang bersifat uraian, argumentasi, dan pemaparan yang kemudian akan di analisis.

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam tahapan penelitian. Dalam hal ini dijelaskan jenis dan desain penelitian, pendekatan yang dipergunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan data. Teknik yang digunakan dikemukakan alasan penggunaan teknik yang dimaksud.¹

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian lapangan, yang berkaitan dengan efektifitas penyaluran dana kondef dalam pemberdayaan masyarakat desa baruga. Namun disamping itu juga penelitian ini dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, dimana gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut. Dalam hal ini yang menjadi lokasi atau objek penelitian ialah Desa Baruga yang berada kecamatan malili kabupaten luwu timur.

¹*Pedoman penulisan karya ilmiah (Makalah, Skripsi, dan Tesis)*, STAIN Palopo ,2012, h.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 07 November 2017 dan Nuha Surowako pada tanggal 26 Februari 2018.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. dalam hal ini yang dapat diambil berasal dari Kantor Desa Baruga. Sedangkan data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian. sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian seperti persepsi atau pendapat masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*Interview*) telah diakui sebagai teknik pengumpulan data atau fakta yang penting dan banyak dilakukan dalam pengembangan informasi.² Wawancara merupakan Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan kepada pihak yang

² Jogiyanto, *analisis dan desain sistem informasi pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis*, (Cet. 3; Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 1989) h.617.

bersangkutan, dalam hal ini yaitu kepala desa, ketua penyaluran dana Comdev, masyarakat yang berada di Desa Baruga itu sendiri.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan (*Observation*) merupakan salah satu teknik pengumpulan fakta/data observasi adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan penulis dengan jalan mengamati secara langsung sumber data yang nantinya di analisis terhadap keadaan atau objek sasaran.³ Dalam hal ini observasi akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran seberapa efektifkah penyaluran dana Comdev untuk pemberdayaan masyarakat Desa Baruga.

c. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, ceritera, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Sedangkan yang berbentuk karya misalnya gambar, patung, film, dan lain-lain yang berbentuk karya seni.

³ Afdal, *analisis implementasi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) terhadap persepsi masyarakat dan kinerja keuangan pada perusahaan daerah air minum (PDAM) kota palopo*, (palopo: institute agama islam negeri (IAIN) palopo, 2016)h .44

E. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode kualitatif yaitu pengolahan data yang digunakan yaitu *editing* adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data, *koding* adalah mengklafikasikan jawaban-jawaban dari responden kedalam kategori-kategoori, *tabulasi* adalah membuat tabel atau jawaban-jawaban yang sudah diberi kode jawaban kemudian dimasukkan dalam table.⁴

2. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nasution menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data kualitatif lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁵ Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum antara lain:

⁴ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Cet. 12, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012) h. 153-155

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Cet, 17; Bandung: Alfabeta, Cv, 2013) h. 428

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.⁶

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori *flowchart* dan sejenisnya.

3. Verifikasi (*verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka data kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.⁷

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 431

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), h. 438

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis

a. Luas Wilayah

Desa Baruga adalah satu Desa dari tiga belas (13) desa yang terletak di Wilayah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Desa Baruga terbagi dalam tiga (3) Dusun yakni Dusun Lagaroang, Dusun Langaru dan Dusun Samudra. Luas Wilayah Desa Baruga secara administratif 720 ha yang terdiri dari:

Luas Permukiman : 36Ha

Luas Perkantoran : 1,9 Ha

Luas Pendidikan : 1,6 Ha

Luas Perdagangan : 14 Ha

Luas Peribadatan : 1,5 Ha

Walaupun Kecamatan Malili memiliki tiga belas desa dimana 13 desa tersebut semuanya merupakan cakupan wilayah dari PT VALE Indonesia namun hanya tujuh 9 desa yang berhak menerima bantuan program pemberdayaan dari perusahaan PT VALE.¹

¹Mega, *Profil Desa Baruga 2017*, di Kantor Desa Baruga. 19 November 2017

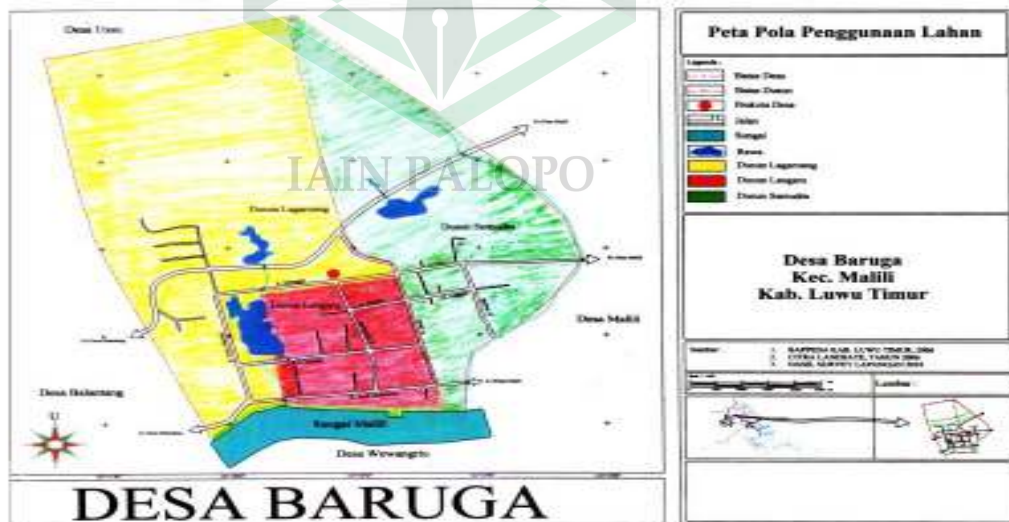
b. Batas Wilayah

Tabel 4. 1

LETAK	DESA	KECAMATAN
SebelahUtara	Desa Ussu	Malili
SebelahTimur	Kelurahan Malili	Malili
Sebelah Selatan	Sungai Malili	Malili
SebelahBarat	DesaBalantang	Malili

Ini adalah batas wilayah Desa Baruga yang berada disebelah utara Desa Ussu dan sebelah barat dari Desa Balantang

c. Peta Desa



2). Jumlah Penduduk Tahun 2017

Tabel 4. 2

NO	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH
	LAKI – LAKI	PEREMPUAN	
1	1.724	1.585	3.309

3). Jumlah Kepala Keluarga

Tabel 4. 3

NO	JUMLAH KELUARGA		JUMLAH KK
	KK LAKI – LAKI dan PEREMPUAN	KK PEREMPUAN	
1	1.330 KK	-	1.330 KK

B. Persepsi Semua Pihak yang Terlibat dalam Penyaluran Dana Program Pemberdayaan

1. Persepsi tentang efektivitas penyaluran dana program pemberdayaan

No	Kode Soal	Kode Responden	Jawaban Responden
1	1	1,2,3,5,7,10,11,12,13,14	Efektif atau tidaknya penyaluran dana program pemberdayaan yang ada di Desa Baruga ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukurnya yang pertama yaitu sasaran dari pemberian dana program harus tepat dan kedua yaitu dari dana yang diberikan difungsikan secara maksimal serta semua program harus terlaksana. dan dapat dikatakan telah efektif.
2	1	4,6,8,9	Dana program pemberdayaan tidak efektif karena di Desa tidak bisa dipungkiri adanya multi kepentingan dan nepotisme namun masyarakat dapat diperdayakan dengan adanya dana program pemberdayaan yang diberikan oleh PT VALE..

IAIN PALOPO

2. Persepsi tentang jumlah program pemberdayaan

No	Kode Soal	Kode Responden	Jawaban Responden
1	2	1,2,5,8,7,9,10,11,12,13,14,	Ada beberapa program pemberdayaan diantaranya ekonomi, kesehatan, pendidikan, social budaya dan lingkungan
2	2	3,4,6	Program pemberdayaan khusus untuk Kecamatan ada 2 fokus diantaranya yaitu sarana dan pelatihan

3. Persepsi jumlah anggaran dana program pemberdayaan

No	Kode Soal	Kode Responden	Jawaban Responden
1	3	3,5,7,9,10,11,12,13,14	Jumlah anggaran dana program pemberdayaan yang diterima oleh setiap Desa yang terkena operasi dampak perusahaan PT Vale sebanyak 300 juta rupiah yang dipotong sebanyak 10 %
2	3	1,2,4,6,8	Untuk jumlah anggaran dana program pemberdayaan yang dikelola untuk kecamatan sebanyak 200 juta rupiah yang sampai ke masyarakat hanya sejumlah 150 juta rupiah

4. Persepsi tentang mekanisme pencairan dana program pemberdayaan

No	Kode Soal	Kode Responden	Jawaban Responden
		1,2,3,4,5,6,7,8	Pencairan dana program pemberdayaan bersifat open menu yang dimana usulan masyarakatlah menjadi program bantuan pemberdayaan sehingga program program yang ada semuanya berasal dari usulan masyarakat

5. Persepsi tentang potensi ekonomi masyarakat setelah mendapatkan bantuan program pemberdayaan

No	Kode Soal	Kode Responden	Jawaban Responden
		1,2,3,5,7,9,10 11,12,13,14	Banyak pelaku pelaku UKM yang diberi bantuan yang sekarang sudah berkembang dan taraf hidup masyarakat juga sudah jauh lebih

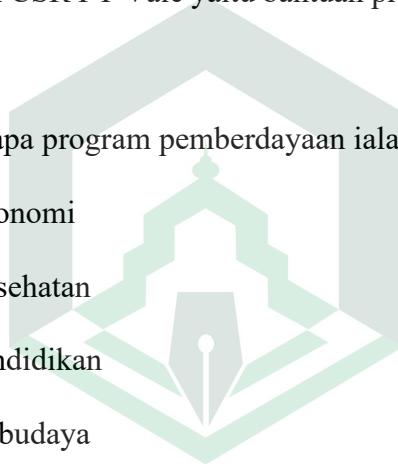
			baik sebelum mendapatkan bantuan dana program pemberdayaan
		4,6,8	Hanya sebagian saja masyarakat yang maju yang diberikan bantuan dana program pemberdayaan karena hampir semua masyarakat mendapatkan bantuan hanya berupa lemari jualan.

C. Hasil Penelitian

Implementasi CSR PT Vale ada banyak dan salah program dari implementasi program CSR PT Vale yaitu bantuan program pemberdayaan kepada masyarakat

Adapun beberapa program pemberdayaan ialah:

1. Bidang Ekonomi
2. Bidang Kesehatan
3. Bidang Pendidikan
4. Sosial dan budaya
5. lingkungan



penelitian ini difokuskan pada satu pendekatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu bidang ekonomi

ada beberapa informan yang menjadi fokus peneliti diantaranya yaitu

1. PT Vale
2. Direktur Eksekutif PT Vale
3. Pengurus Kabupaten
4. Pengurus Kecamatan
5. Pengelola dana program pemberdayaan masyarakat Desa Baruga

6. Pengawas lapangan Desa Baruga
7. Masyarakat penerima bantuan program pemberdayaan
8. Pemerintah Desa

Inilah beberapa fokus informan yang telah memberikan keterangan tentang bagaimana mekanisme penyaluran dana Comdev.

1. Metode Penyaluran dana program pemberdayaan masyarakat

Penyaluran dana program pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui mekanisme penyaluran dana langsung dari unit atau bagian yang bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan PT Vale ke rekeninig kolektif bantuan langsung masyarakat yang dikelola oleh Komite Desa dan Komite Kecamatan. Adapun uraian penyaluran dana program pemberdayaan yaitu penyaluran dana yang berasal dari PT Vale mengikuti ketentuan yang diatur dalam system keuangan perusahaan, penyaluran dana untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan yang berasal dari PT Vale dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam panduan teknis operasional (PTO) yang dikeluarkan oleh tim koordinasi PTPM, dan besaran dana program pemberdayaan yang disalurkan langsung pada masyarakat harus utuh sesuai dengan peraturan yang disepakati untuk setiap Desa dan Kecamatan tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.²

Seperti yang dikatakan Iskandar ismail CRO PT Vale Indonesia yang dalam keterangan yang telah diberikan kepada peneliti ia mengemukakan bahwa:

² Tim Koordinasi Kabupaten, *Program Mitra Desa Mandiri*, (Ed Revisi, Luwu Timur: PT Vale Indonesia Tbk, 2014). h. 24

“jadi perusahaan PT Vale hanya memberikan skema pendanaan, skema program, skema pelaku. apapun bentuk kongkrit kegiatan semuanya tergantung pada masyarakat, total anggaran dana program pemberdayaan sebesar 300 juta rupiah yang langsung diberikan kepada pengelola yang ada di desa.”³

Dari keterangan yang diberikan oleh Iskandar Ismail perusahaan PT Vale hanya memberikan gambaran bagaimana skema pendanaan, skema program, skema pelaku serta total anggaran yang diberikan kepada setiap desa yang masuk kedalam kawasan area yang terkena dampak. Selain itu Iskandar Ismail juga menambahkan sasaran program adalah masyarakat di wilayah terdampak operasi PT Vale yang berlokasi di beberapa desa di Kecamatan Nuha, Wasuponda, Towuti, dan Malili serta berhak mendapatkan akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi terutama yang masuk dalam kategori Rumah tangga miskin (RTM) dan kelompok rentan. Penerima manfaat diutamakan bagi kelompok masyarakat miskin, kelompok rentan dan yang selama ini belum mendapatkan pelayanan kesehatan dan akses ekonomi.

IAIN PALOPO

“Jenis kegiatan yang didukung pendanaannya oleh PT vale melalui program pemberdayaan bersifat terbuka (*open menu*)

Dimana masyarakat diberikan ruang untuk menentukan kegiatan sesuai kebutuhan yang terkait bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Disamping itu, ditetapkan kriteria kegiatan yang termaksud dalam daftar larangan (*negative list*) dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan program. Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan di desa harus mampu menjangkau pelayanan

³ Iskandar Ismail, CRO PT Vale, *Wawancara*, Surowako: 26 Februari 2018

akses dan mutu pendidikan, kesehatan dasar dan ekonomi produktif bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum atau tidak mampu mengakses pelayanan tersebut.

Program pemberdayaan masyarakat mengembangkan organisasi kerja tidak dimaksud untuk membangun kelembagaan baru tetapi lebih mengutamakan penguatan kelembagaan masyarakat yang telah ada. PT Vale mendorong penguatan kelembagaan tersebut agar dihasilkan keselarasan, keterpaduan, harmonisasi dan optimalisasi kegiatan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Dimana dalam pengembangan organisasi kemasyarakatan di Desa Baruga dilakukan upaya pengawasan agar supaya nanti kelompok masyarakat atau organisasi yang ada yang di Desa Baruga yang menerima bantuan dana program pemberdayaan tidak hanya berkembang tetapi memiliki tujuan jangka panjang yang lebih maksimal.

Penetapan lokasi program pemberdayaan masyarakat dilancarkan kontrak karya antara pemerintah dengan PT Vale terkait wilayah dampak operasi. Penentuan lokasi program pemberdayaan meliputi lingkungan eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan yang memerlukan pengelolaan sosial dan pengendalian jangka panjang dari manajemen perusahaan. Lokasi program pemberdayaan sebagai bagian dari peran tanggung jawab sosial PT Vale dilaksanakan di wilayah terdampak operasi yaitu 4 kecamatan dari 38 desa di kabupaten Luwu Timur.

Daftar lokasi penerima bantuan program pemberdayaan

No	Nama Kecamatan	Nama Desa
1	Nuha	Desa Nikke Desa Sorowako Kelurahan Magan Desa Matano Desa Nuha
2	Towoti	Desa Langkea Raya Desa Asuli Desa Wawondula Desa Baruga Desa Lioka Desa Matompi Desa Timampu Desa Pekalao Desa Tole Desa Libukan mandiri Desa Kalosi Desa Buangin Desa Mahalona Desa Loeha Desa Rante Angin

		Desa Bantilang Desa Tokalimbo Desa Masiku
3	Wasuponda	Desa Tabarabo Desa Wasuponda Desa Ledu-Ledu Desa Balambano Desa Parungpanai
4	Malili	Desa Harapan Desa Pasi-Pasi Desa Pongkeru Desa Laskap Desa Puncak indah Desa Malili Desa Wewangriu Desa Baruga Desa Balangtang

Sumber data: PT Vale Indonesia Tbk

Dari informasi yang diberikan oleh Iskandar Ismail tentang metode penyaluran dana program pemberdayaan masyarakat diperkuat pula oleh Andi Narwis. Dalam keterangan yang diberikan Andi Narwis mengemukakan beberapa pandangannya tentang bagaimana mekanisme penyaluran dana program pemberdayaan masyarakat

“pencairan dana program pemberdayaan masyarakat mengikuti mekanisme pencairan dana PT Vale dari rekening pengelola program yang dikelola komite Desa kepada pelaksana kegiatan sebanyak 300 juta rupiah. Sedangkan di tingkat Kecamatan dana disalurkan melalui rekening pengelola program yang dikelola oleh komite kecamatan sebanyak 200 juta rupiah.”⁴

Dari ungkapan Andi Narwis tersebut diuraikan pula bagaimana mekanisme pencairan dana di tingkat Desa yaitu:

- a. Seluruh usulan di tingkat Desa telah melalui proses penyepakatan dalam musyawarah desa dan diverifikasi oleh TVK-Kab PTPM dengan melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa (SKKD).
- b. Komite Desa menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dengan melampirkan dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan dokumen pendukung lainnya)
- c. Pembuatan Surat Perjanjian Penyaluran Dana sesuai kebutuhan PK Desa yang diketahui oleh FK PTPM.
- d. Pencairan dana dilakukan sekaligus oleh PT Vale melalui rekening Kolektif Komite Desa sesuai dengan alokasi pendanaan desa dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas.
- e. Komite Desa sesuai dengan SPPD melakukan pencairan dana ke rekening PK Desa secara bertahap sesuai dengan perkembangan pekerjaan dilengkapi dengan laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan bukti-bukti yang sah.

2. Efektivitas penyaluran dana program pemberdayaan masyarakat

⁴ Andi Nawir, Pengurus Kabupaten, *Wawancara*, Malili: 25 Februari 2018

Ashar Karateng merupakan Direktur Eksekutif PT Vale yang bertempat tinggal di kompleks BBD Raya No. 14 Jln. Taman Makam Pahlawan-Tello Baru, Panakukang Makassar. Dalam pertemuan yang kami lakukan di lokasi perusahaan PT Vale pada tanggal 26 februari 2018 beliau mengemukakan pendapatnya tentang indikator yang digunakan perusahaan untuk mengukur sejauh mana keefektivan penyaluran dana program pemberdayaan masyarakat.

“untuk melihat efektif atau tidaknya penyaluran dana program pemberdayaan perusahaan memiliki indikator yaitu apabila semua program yang telah menjadi prioritas terlaksana secara baik.”⁵

Dari ungkapan Ashar Karateng menyimpulkan bahwa apabila semua program yang telah diberikan terlaksana secara maksimal maka penyaluran dana program pemberdayaan di Desa Baruga dapat dikatakan Efektif melalui sudut pandang perusahaan. Selain itu pada bagian ekonomi untuk melihat efektif atau tidaknya adapun memberikan keterangan seberapa banyak pelaku UKM yang terbantu dengan adanya pemberian dana Comdev dan seberapa banyak pelaku UKM menengah yang sudah meningkat usahanya. Selain itu adapun kriteria efektifitas Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya pengelola dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Kemudian ditambahkan pula oleh Nurlinda tentang awal mula pemberian dana program pemberdayaan masyarakat dan cara untuk mengukur keefektivan

⁵ Ashar Karateng, Direktur Eksekusi PT Vale, *Wawancara*, Surowako: 26 Februari 2018

penyaluran dana program pemberdayaan dalam wawancara yang kami lakukan Nurlinda berpendapat:

Dana program pemberdayaan masyarakat sudah ada sejak era 1990 an namun baru berkembang pada tahun 2013 ketika dana program pemberdayaan terakomodir dalam bentuk program kerja, yang dulunya dana program pemberdayaan masyarakat yang langsung meminta ke perusahaan PT Vale. Program pemberdayaan masyarakat yang ada pada saat ini berbeda dengan yang dahulu dimana program pemberdayaan yang dahulu tidak memiliki arah dan tujuan serta tidak ada evaluasi sedangkan program pemberdayaan yang ada saat ini memiliki arah dan tujuan serta ada evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan PT Vale. Adapun program pemberdayaan masyarakat yang ada di Kecamatan yaitu sarana dan pelatihan sementara jumlah anggaran yang ada di Kecamatan sebanyak 200 juta rupiah. Nurlinda mengatakan bahwa:

“untuk melihat secara utuh apakah dana program pemberdayaan masyarakat tersentuh langsung atau tidak kemasyarakat sebenarnya dana program pemberdayaan tidak efektif karena di Desa tidak bisa dipungkiri adanya multi kepentingan dan nepotisme.”

dari ungkapan Nurlinda jelas bahwa penyaluran dana program pemberdayaan sebenarnya tidak efektif secara umum namun hanya saja tidak bisa dilihat dari satu sisi saja karena dana program pemberdayaan yang diberikan ke masyarakat untuk pemberdayaan ternyata memiliki manfaat yang sangat baik dan masyarakat juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuan ekonominya yang dimana terlihat banyaknya pelaku pelaku UKM yang sudah berkembang.

Dari keterangan Nurlinda diperkuat pula oleh pernyataan Nurbaety tentang awal mula pemberian dana Comdev dari perusahaan PT Vale. Setelah melakukan wawancara dengan Nurbaety beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa:

“Desa Baruga pada awalnya menerima Dana program pemberdayaan namun dikelola oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur, hingga PT VALE mengeluarkan aturan bahwa Dana program pemberdayaan dikelola oleh masyarakat hingga terbentuklah komite sampai sekarang ini, di tingkat desa ada namanya Pelaksana Lapangan (PL) dan PL inilah yang membagikan dana Comdev ke masyarakat.”⁶

Pernyataan Nurbaety menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana program pemberdayaan pertama kali dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan hingga keputusan perusahaan PT VALE mengeluarkan aturan tentang pengelolaan dana program pemberdayaan dikelola oleh masyarakat seperti yang juga dikatakan oleh CRO PT Vale bahwa awal mula pengelolaan dana program pemberdayaan itu dikelola oleh pemerintah. Sejalan dengan hal itu Desa Baruga kemudian mengelola dana program pemberdayaan yang dimana pengelolanya ialah Nurbaety, anggaran dana program pemberdayaan yang didapatkan Desa Baruga berjumlah 300 juta rupiah yang dua kali dicairkan dalam setahun . Dari jumlah anggaran dana program pemberdayaan yang diterima tidak semuanya diperuntukkan untuk masyarakat untuk dikelolanya melainkan dikeluarkan sebanyak 10 % untuk biaya operasional kegiatan.

Adapun jenis dan proporsi alokasi pendanaan program pemberdayaan di Desa Baruga

No	Alokasi Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
----	------------------------	-------------

⁶Nurbaety “wawancara”. Desa Baruga: 21 November 2017

1	Pengadaan sarana dan prasana pendukung pelayanan kesehatan	25%
2	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung ekonomi perdesaan	35%
3	Pengembangan PAUD	20%
4	Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembangaan (misalnya: pelatihan, life skills, penyuluhan, konsultasi dll).	13%
	Biaya administrasi dan operasional program (ATK, transportasi, pertemuan/rapat, insentif Komite Desa dan insentif KPMD)	7%

Dari tabel tersebut diketahui bahwa capaian sasaran program pemberdayaan masyarakat sangat terarah dengan adanya pedoman pelaksanaan program kegiatan sehingga sangat sedikit persentase kesalahan yang akan terjadi dikarenakan tujuan yang dari pemberian bantuan program pemberdayaan sudah dimuat dalam pedoman pelaksanaan kegiatan.

Adapun fokus dari pada dana program pemberdayaan masyarakat ialah bidang ekonomi, bidang pendidikan serta bidang kesehatan kemudian peneliti terfokus kepada bidang ekonomi dimana sejalan judul yang diangkat oleh peneliti.

Dari pernyataan Nurbaety diatas dibenarkan pula oleh Sawal, sawal mengatakan bahwa:

“Memang benar Desa Baruga menerima dana sebesar 300 juta rupiah yang dalam setahun dicairkan sebanyak dua kali dan desa Baruga juga baru ini

tahun memberikan dana program pemberdayaan berupa barang dan tidak dalam bentuk uang.”⁷

Dari pernyataan Sawal diatas menunjukkan bahwa apa yang kemudian dikatakan oleh Nurbaety memang sebuah fakta yang benar sehingga peneliti kemudian percaya bahwa keterangan informan betul betul memberikan fakta tentang jumlah dana program pemberdayaan yang diterima oleh Desa Baruga serta bagaimana sejarah dan mekanisme cara mendapatkan dana program pemberdayaan di Desa Baruga.

Kemudian ditambahkan pula oleh pengawas pengelolaan dana program pemberdayaan masyarakat dalam perbincangan yang kami lakukan Yudi Burhan memberikan keterangan tentang bagaimana cara untuk melihat apakah program pemberdayaan masyarakat efektif dalam memberdayakan masyarakat Desa Baruga.

“untuk melihat efektif atau tidaknya program pemberdayaan yang ada di Desa Baruga ada beberapa faktor yang menjadi tolak ukurnya yang pertama yaitu sasaran dari pemberian dana harus tepat dan kedua yaitu dari dana yang diberikan difungsikan secara maksimal.”⁸

Melihat fakta serta bukti dari hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang menerima dan yang tidak menerima dana program pemberdayaan. Ada beberapa hasil yang berbeda dimana masyarakat yang menerima dana menganggap bahwa pemberian bantuan dana sangat membantu dan memberdayakan tetapi dari sudut pandang masyarakat yang tidak menerima bantuan dana mengatakan bahwa

⁷Sawal,” *Wawancara*”, Desa Baruga: 21 November 2017

⁸ Yudi Burhan, Pengawas Desa, *Wawancara*, Desa Baruga: 27 Februari 2018

penyaluran dana itu tidak terlalu efektif dengan alasan yang berbeda-beda dimana seperti ungkapan Haruna:

“dana program pemberdayaan di Desa Baruga belum efektif karena masih banyak masyarakat yang menerima dana program pemberdayaan sampai berulang-ulang sementara masih banyak masyarakat yang belum pernah menerima dana program pemberdayaan”⁹

Dari pernyataan diatas tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur efektif atau tidaknya penyaluran dana program pemberdayaan di Desa Baruga karena perusahaan PT Vale memiliki indikator yang berbeda dimana indikator tersebut dikatakan bahwa tolak ukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dilihat dari apakah semua program yang sudah direncanakan terlaksana secara maksimal dan semua bantuan dana program pemberdayaan difungsikan oleh penerima dana program pemberdayaan di Desa Baruga. Sementara itu dari pihak Pemerintah Desa Baruga memberikan keterangan tentang kontribusi Pemerintah Desa dalam penyaluran dana program pemberdayaan. Dalam wawancara saya lakukan bersama sekretaris Desa Baruga

Toni Farid berusia 41 tahun yang bertempat tinggal di Dusun Samudra dia adalah sekretaris Desa Baruga yang sudah lebih satu tahun menjabat sebagai sekretaris Desa. Dalam perbincangan yang kami lakukan beliau mengemukakan pendapatnya:

“Dana program pemberdayaan masyarakat yang berasal dari PT Vale tidak dikelola oleh Desa tetapi dikelola langsung oleh pengelola Desa, total anggaran yang dikelola oleh pengelola yang ada di Desa sebanyak 300 juta,

⁹ Haruna, Masyarakat Penerima Dana Comdev, *Wawancara*, Desa Baruga: 27 Februari 2018

jadi fungsi Desa dalam pemberian dana program pemberdayaan dari PT Vale hanya sebatas fasilitator untuk masyarakat Desa Baruga.”¹⁰

Dari informasi tersebut diketahui bahwa dana tidak dikelola oleh Pemerintah Desa melainkan dikelola oleh pengelola yang ada di Desa sementara itu total anggaran yang diterima oleh pengelola dari perusahaan PT Vale sebanyak 300 juta seperti yang dikatakan oleh CRO PT Vale Iskandar Ismail.

Selain itu pula Toni Farid juga menyampaikan bahwa untuk bidang ekonomi ada beberapa program yang dijalankan oleh pengelola Desa diantaranya yaitu bantuan untuk pelaku UMKM yang di Desa seperti bantuan lemari jualan, pemberian alat pertukangan, pembuatan workshop inilah tiga bentuk program yang dijalankan pengelola terkhusus untuk bidang ekonomi.

adapun tanggapan masyarakat yang menerima dana program pemberdayaan di Desa Baruga, Inilah beberapa masyarakat yang menerima dana program pemberdayaan di Desa Baruga

H. Muhctar

IAIN PALOPO

Informan yang pertama dalam penelitian ini adalah H. Muhctar yang berusia 51 tahun, yang berjenis kelamin laki-laki dan beragama islam bertempat tinggal di dusun langaru, berprofesi sebagai tukang cukur dan menekuni pekerjaan ini selama 5 tahun, mempunyai seorang istri dan bekerja sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai 4 orang anak, dimana anak pertama berusia 22 tahun yang masih sebagai pelajar di salah satu Universitas di Sulawesi Selatan. Mengatakan bahwa:

¹⁰ Toni Farid, Sekertaris Desa, *Wawancara*, Desa Baruga: 27 Februari 2018

“Engkanna yae Dana program pemberdayaan magessing ladde nasaba na bantuki naerekki bantuang berupa barang namun engka to na de’na magessing nasaba yaro barang ee Tania idi melliwi”¹¹

Arti dari ungkapan H. Muchtar ialah adanya ini Dana program pemberdayaan sangat bagus karena kita diberikan bantuan berupa barang namun yang tidak baiknya ialah alat yang diinginkan oleh H. Muchtar bukan beliau yang membelinya sendiri yang sesuai dengan keinginan H Muchtar, ini memang kebenaran yang dikemukakan oleh H. Muchtar dimana peneliti melihat secara langsung barang yang diberikan kepada wawancara kepada H. muchtar di rumahnya hal ini menunjukkan bahwa H. Muchtar tidak merasa puas dengan apa yang kemudian diberikan kepadanya karena seandainya pemenuhan keinginan yang diinginkan H. Muctar itu terlaksana maka penyaluran dana program pemberdayaan desa baruga sangat bisa dikatakan efektif dan berhasil, namun hal tersebut merupakan aturan yang dibuat oleh komite jadi secara otomatis keinginan H. Muchtar tidak bisa terpenuhi seutuhnya. Kemudian ditambahkan juga oleh Musbachair

IAIN PALOPO

Musbachair yang berusia 37 tahun, yang berjenis kelamin laki laki dan beragama islam bertempat tinggal di dusun lagaroang, berprofesi sebagai seorang Nelayan dia telah menekuni pekerjaannya selama kurang lebih 3 tahun mempunyai 4 orang anak dimana anak pertamanya kembar laki laki kemudian anak ke tiga dan empat adalah perempuan dan jarak umur mereka sangat dekat kurang lebih hanya berkisar 2 tahun anak pertamanya saat ini sudah duduk disekolah dasar kelas 6.

¹¹ H. Muchtar, Penerima Dana Comdev, “wawancara”, Desa Baruga: 21 November 2017

Selama Musbachair menekuni pekerjaannya sebagai seorang nelayan baru sekali saja menerima danaprogram pemberdayaan di Desa Baruga tepatnya tahun 2015 pada saat itu memang kebutuhan Musbachair harus dipenuhi karena apabila tidak dipenuhi maka dia tidak dapat lagi penghasilan untuk keluarganya dimana kebutuhannya saat itu ialah pukat untuk menjaring ikan dimana sebelumnya pukat yang dia punya sudah rusak namun masih dapat digunakan hanya saja penghasilan yang diperolehnya semakin berkurang dengan adanya program pemberdayaan di Desa Baruga membuat musbachair sangat terbantu dengan program pemberdayaan tersebut, seperti ungkapan Musbcair kepada peneliti:

“ Saya menerima dana program pemberdayaan pada tahun 2015 pada saat itu memang saya sangat membutuhkan alat untuk melaut, saya kemudian mendapat dana program pemberdayaan yang diberikan dalam bentuk barang berupa pukat hal ini sangat membantu saya untuk memperoleh penghasilan untuk keluarga dan dengan pemberian dana program pemberdayaan kami merasa sangat terbantu.”¹²

Dari ungkapan Musbchair diatas menunjukkan bahwa memang program pemberdayaan masyarakat sangat membantu dan memberdayakan masyarakat yang ada di Desa Baruga terkhusus untuk Musbchair sendiri karena hal ungkapan Muasbchair tidak sama dengan apa yang diungkapkan oleh H. Muchtar. Dengan pemberian berupa barang, program pemberdayaan yang ada di Desa Baruga sangat berperan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di Desa Baruga hal itu dapat dilihat dari dua informan diatas yang memberikan keterangan tentang bagaimana bantuan program pemberdayaan memfasilitasi kebutuhan sehingga secara otomatis peningkatannya semakin membaik dengan

¹² Musbachair, Penerima Dana Comdev, “*Wawancara*”. Desa Baruga: 21 November 2017

bantuan yang telah diberikan dan hal itu juga menunjukkan bahwa program pemberdayaan mampu membuat masyarakat Desa Baruga menolong dirinya sendiri. dimana ada tujuh prinsip prinsip dari program pemberdayaan itu sendiri.

- 1) Kerjasama secara bertanggung jawab, serta mobilisasi individu individu untuk tuuan saling tolong menolong diri sendiri, memecahkan masalah, integrasi sosial dan tindakan sosial.
- 2) Partisipasi terhadap masyarakat paling bawah harus ditingkatkan.
- 3) Kesesuaian dengan komunitas lokal untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan
- 4) Sumberdaya komunitas harus dimobilisasi dalam bentuk berkesinambungan dalam pembangunan.
- 5) Kebersamaan komunitas dalam hubungan sosial dan hubungan structural.
- 6) Meningkatkan aktifitas atau perasaan solidaritas diantara kelompok kelompok marginal dengan mengaitkannya dengan kekuatan perkembangan dalam sektor sektor sosial dan kelas untuk mencari kesempatan ekonomi, sosial, dan alternatif politik.
- 7) Memberikan kemampuan bagi kelompok kelompok marginal untuk melaksanakan perubahan dari dalam kelompok tertentu.

Inilah prinsip yang seharusnya dilakukan di Desa Baruga dimana dikatakan bahwa unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Sesuai dengan teori pemberdayaan bahwa masyarakat itu diberdayakan apabila diberikan kewenangan dan pengembangan masyarakat itu sendiri, hal tersebut sesuai dengan 7 prinsip yang ada. Dari berbagai tanggapan masyarakat yang menerima program pemberdayaan

Ahmad Alam memberikan keterangannya tentang kepuasaannya terhadap pemberian dana program pemberdayaan

Ahmad Alam yang berusia 51 tahun yang berprofesi sebagai tukang cukur menekuni pekerjaannya selama beberapa tahun pada saat peneliti mulai mendaftar kuliah di IAIN Palopo yang yang terhitung kurang lebih 5 tahun, Ahmad Alam bertempat tinggal Dusun Lagaroang tepatnya dekat kantor Desa Baruga yang berhadapan dengan pasar Sentral Malili,

Ahmad Alam mencukur selama beberapa tahun ini, Ahmad Alam tentu memiliki permasalahan ataupun kendala dalam membiayai kehidupan keluarganya hal itu sudah menjadi kebenaran yang mutlak karena tak dapat penghasilan selama beberapa hari dikarenakan alat untuk mencukur atau mesin pencukur ayah saya telah rusak pada saat itu juga Ahmad Alam mengusulkan untuk pemberian bantuan dana Comdev di Desa Baruga, setelah mengusulkan permohonan bantuan akhirnya Ahmad Alam dapat bantuan alat cukur berupa mesin, cermin, lemari dan alat-alat lainnya. Namun dari bantuan yang diterimanya tidak semuanya diberikan secara langsung oleh pelaksana lapangan karena keterbatasan bahan yang dimiliki dimana mesin cukur itu sendiri saya sendiri yang membelinya di Kota Palopo pada saat itu saya diberika uang oleh pelaksana lapangan sebanyak satu juta dua ratus ribu dengan jaminan bahwa ketika melakukan pembelian mesin harus disertakan kwitansi dari toko.

Ahmad Alam mengatakan:

“program pemberdayaan di desa Baruga ini sangat membantu kita dalam meningkatkan perekonomian keluarga, hanya saja kita sebagai penerima program pemberdayaan harus betul betul mengfungsikan apa yang telah diberikan kepada kita.”¹³

Dari pernyataan Ahmad Alam diatas menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang ada di Desa Baruga sangat meningkatkan perekonomian keluarga saya dimana dengan adanya bantuan dana program pemberdayaan membuat Ahmad Alam mampu menghasilkan kembali setelah beberapa hari tak memiliki penghasilan dan dari pernyataan itupula dia menyimpulkan dana Comdev sangat memberdayakan masyarakat Desa Baruga hanya saja masyarakat yang harus berfikir untuk bagaimana baiknya program yang diberikan dikelola sebaik mungkin sehingga tidak ada lagi masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Selain Ahmad Alam Aisyah juga memberikan jawaban tentang penyaluran dana Comdev di Desa baruga

Aisyah yang berusia 31 tahun yang berprofesi sebagai penjual mainan anak-anak di pasar sentral malili yang memiliki 2 orang anak yang berusia 6 tahun beliau tinggal bersama anak dan suaminya yang bertempat tinggal di dusun langaru yang tidak jauh dari rumah peneliti.

Aisyah adalah salah satu penerimanya program pemberdayaan yang ada di Desa Baruga pada saat itu dia mendapatkan bantuan berupa barang mainan yang

¹³Ahmad Alam, Penerima Dana Comdev, ”*Wawancara*”, Desa Baruga: 21 November 2017

kemudian ia pasarkan di pasar Sentral Malili, setelah melakukan wawancara dengan Aisyah akhirnya ia mengungkapkan bahwasanya:

“sebenarnya pada saat menerima dana program pemberdayaan saya berharap bahwa saya yang akan membeli mainan yang akan saya pasarkan namun ternyata bukan saya yang membelinya secara langsung dimana ketika saya membelinya pasti saya mengetahui kebutuhan apa saja yang saya butuhkan karena saya yang akan memasarkannya secara langsung.”¹⁴

Dari ungkapan Aisyah dapat disimpulkan bahwa tidak semua kebutuhan penerima harus diberikan dalam bentuk barang melainkan diberikan dalam bentuk uang agar supaya kebutuhan dasar dari penerima itu mampu ia penuhi dengan cara merekalah yang membelinya secara pribadi namun sesuai dengan aturan ataupun disertakan dengan bukti bahwa penerimanya menggunakan dana yang diberikan sesuai dengan tujuan dari pemberian dana itu sendiri, dengan cara pelaksana lapangan melakukan kontrol terhadap penerima dana program pemberdayaan dengan demikian pelaksana lapangan mampu melihat bahwa ternyata masyarakat diberdayakan dengan program tersebut. dari berbagai bantuan yang diberikan ada juga skala prioritas dari pemberian seperti pemberian jamban kepada masyarakat yang belum memiliki jamban dalam hal ini sampara yang menerima program berupa jamban memeberikan tanggapan tentang pemberian bantuan tersebut yang dalam keterangannya mengemukakan bahwa::

“ kami sangat syukur karena program pemberdayaan bukan hanya untuk masyarakat yang memiliki usaha tetapi juga untuk masyarakat yang kurang mampu seperti kami yang tidak memiliki tempat pembuangan atau wc.”¹⁵

¹⁴ Aisyah, Penerima Dana Comdev, “Wawancara”, Desa Baruga: 22 November 2017

¹⁵ Sampara, Penerima Dana Comdev, “Wawancara”, Desa Baruga: 22 November 2017

Dari ungkapan Sampara kemudian peneliti menyimpulkan bahwa ternyata bahwa program yang ada di Desa Baruga tidak hanya untuk masyarakat yang memiliki usaha atau komunitas tetapi juga di prioristaskan untuk masyarakat yang betul betul tidak memiliki kemampuan ekonomi, hal itu juga dibenarkan oleh ketua pengelola program pemberdayaan Desa Baruga yang mengatakan bahwa dana program pemberdayaan pada dasarnya yang ada di Desa Baruga memprioritaskan kepada masyarakat yang kurang mampu barulah setelah difokuskan kepada yang memiliki usaha ataupun komunitas, dan wawancara yang saya lakukan dengan Nurbaety menyatakan bahwa:

“Pembagian dana program pemberdayaan yang ada di desa Baruga diberikan sesuai dengan per KK.”

Pernyataan Nurbaety memberikan keterangan tentang siapa saja yang menerima program pemberdayaan di Desa Baruga dan ternyata yang berhak itu adalah semua KK yang ada di Desa Baruga dengan alasan bahwa dampak daripada perusahaan PT Vale bukan satu atau dua orang yang terkena dampaknya melainkan secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penemuan data dilapangan dan analisis yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan pernyataan sebagai berikut:

Program pemberdayaan masyarakat di Desa Baruga dikatakan berhasil dan efektif karena sebagian masyarakat merasa bahwa program pemberdayaan sepenuhnya memberikan dampak atau hasil yang memuaskan bagi masyarakat, walaupun ada juga masyarakat yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap program tersebut.

keberhasilan dari program pemberdayaan di Desa Baruga yaitu program program yang menjadi usulan masyarakat baik dibidang ekonomi, kesehatan, pendidikan terlaksana secara maksimal sesuai target waktu pelaksanaan kegiatan program dan sasaran penerima program pemberdayaan sesuai target serta bantuan yang diberikan kepada masyarakat dipergunakan sesuai tujuan adanya pemberian bantuan program tersebut. Serta adanya pelaksanaan pengwasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap bantuan program yang telah diberikan.

B. Saran

1. Sebaiknyaprogram pemberdayaan masyarakat di Desa Baruga diberikan kepada masyarakat yang betul betul layak menerima bantuan, Dalam memberikan jumlah bantuan kepada masyarakat harus ada transparansi terhadap masyarakat dan ditetapkan jumlah dana yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al – Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010

Awang, Asam. 2010. *implementasi pemberdayaan pemerintah desa*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Afdal, 2016. *analisis implementasi prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) terhadap persepsi masyarakat dan kinerja keuangan pada perusahaan daerah air minum (PDAM) kota palopo*, (palopo: institute agama islam negeri (IAIN) palopo.

Depdikbud,1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Jogiyanto, 1989. *Analisis dan desain sistem informasi pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Kusuma Chandra, Putra. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa,*” *Jurnal Admistrasi Publik, vol 1*

Letty Aziz, Nyimas Latifah. 2016. *Otonomi Desa Dan Efektifitas Dana Desa*, *Jurnal Penelitian Politik*.

M. ranchman, Nurdizal et.al., 2011. *panduan lengkap perencanaan CSR*, Jakarta.

M. ivancevich, John. et. Al., 2006. *Perilaku Dan Menejemen Organisasi*, Jakarta: Erlangga.

- Muhammad Guntur Poerboyo, *Implementasi Program Pengembangan Masyarakat (Community Development) Melalui Pola Kemitraan pada Sektor Privat Lampung*: Universitas Lampung, 2010.
- Putranti Budi Maygarindra Rovila EI Maghviroh, *Analisis Alokasi Corporate Social Responsibility serta Pelaporan Sustainability Report Berdasarkan Global Reporting Intiative (GRI G3) di PT. Pembangkitan Jawa Bali*, 2012. Jurnal | Volume 2 No. 2
- Ratna Vita Angela, *Efektifitas Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility Sebagai Bentuk Akuntabilitas Publik*, 2014. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 3. No 6 h. 4.
- Syaniatul Wida, *Analisis Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perpektif Ekonomi Islam*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Sumaryadi, 2005. *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*, Citra Utama.
- Sukaenah, *Tahapan Community Development Oleh Divisi Corporate Affairs PT. Djarum*, Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2014
- Septianis Kartika, Ray. 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo*, Jurnal Bina Praja.
- Tim Koordinasi Kabupaten, *Program MItra Desa Mandiri*, Ed Revisi, Luwu Timur: PT Vale Indonesia Tbk, 2014
- Yustisia, 2016. *Pedoman resmi petunjuk pelaksanaan dana desa*, Jakarta selatan

L

A

M



IAIN PALOPO

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah dana Comdev membantu masyarakat ?
2. Efektifitas cara penyaluran Dana Comdev ?
3. Siapa saja yang berhak menerima Dana Comdev?
4. Bagaimana sebaiknya dana Comdev ?
5. Apakah tujuan dari pemberian dana Comdev ?
6. Apakah betul bahwa dana Comdev yang diberikan dikelola secara maksimal?
7. Sejak kapan dana Comdev hadir di Desa Baruga ?
8. Berapa jumlah Dana Comdev dari perusahaan PT VALE?
9. Dalam bentuk apakah dana Comdev diberikan ?
10. Bagaimana potensi ekonomi masyarakat setelah mendapatkan dana Comdev?
11. Jenis usaha apakah yang menerima dana Comdev?
12. Apakah dana Comdev diberikan kepada masyarakat secara universal ?
13. Bagaimana mekanisme pencairan dana Comdev ?
14. Apa saja program Comdev ?

Daftar Responden

1. Iskandar Ismail
2. Ashar Karateng
3. Andi Narwis
4. Nurlinda
5. Nurbaety
6. Yudi Burhan
7. Sawal
8. Toni Farid;
9. Haruna
10. H.Muchtar
11. Musbachair
12. Ahmad Alam
13. Aisyah
14. Sampara



DOKUMENTASI PENELITIAN

Peneliti dan pengelola Dana Comdev saat peneliti mewawancarai mengenai penyaluran dana Comdev.



Sekretaris Desa Baruga



Pengawasan Pengelola Dana Comdev



CRO PT Vale dan Direktur Eksekutif PT Vale



CRO PT Vale dan Pengelola Kabupaten



Bantuan Dana Comdev



Pengelola Kecamatan

